

## **Dorong Kenaikan dan Simplifikasi Tarif Cukai Rokok, CISDI Adakan *Virtual Coffee Sharing* dengan Aktivistis Muda Pengendalian Tembakau di Asia Pasifik**

- *Dorong kenaikan dan simplifikasi tarif cukai rokok, CISDI adakan pertemuan dengan alumni peserta The 12<sup>th</sup> Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2018 Youth Camp, sebuah side-forum yang melibatkan 50 aktivis pengendalian tembakau muda se-Asia Pasifik*
- *Tarif cukai rokok sebesar 44,7 persen yang berlaku di Indonesia sekarang jauh lebih rendah dari standar global pada angka 70 persen dan belum mencapai batas maksimal yang diatur UU Cukai sebesar 57 persen dan.*
- *Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia sangat kompleks, terdiri atas 10 layer, menyebabkan harga jual rokok bervariasi. Hal ini menyebabkan masih ada rokok dengan harga murah dan mudah dibeli oleh anak di sekolah dasar.*
- *Kementerian dan lembaga yang terbelah dalam isu pengendalian tembakau, mitos terkait rokok yang berkembang di masyarakat, dan kuatnya pengaruh industri tembakau dalam pembuatan kebijakan disinyalir menjadi hambatan kenaikan tarif dan simplifikasi cukai rokok.*

**Jakarta, 21 September 2020** – *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)* mengadakan diskusi virtual bertajuk *Virtual Coffee Sharing with AFACT Youth Camp 2018 Alumni* melalui aplikasi telekonferensi video Zoom pada Selasa (21/9). Kegiatan ini mengumpulkan alumni peserta *The 12<sup>th</sup> Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (The 12<sup>th</sup> AFACT)* untuk mendiskusikan praktik baik strategi pengendalian tembakau melalui mekanisme kenaikan cukai rokok dan simplifikasi tarif cukai rokok.

AFACT adalah forum internasional yang bertujuan untuk mendiskusikan strategi pengendalian tembakau di wilayah Asia Pasifik. Forum yang terselenggara pada 2018 lalu ini diikuti oleh pegiat pengendalian tembakau dengan beragam latar belakang organisasi dari seluruh negara di Asia Pasifik dan juga negara lainnya.

Asia Pasifik adalah salah satu wilayah yang menanggung beban berat akibat konsumsi rokok. Menurut Asia-Pacific Heart Network hampir setengah dari total kematian dunia akibat rokok terjadi di wilayah ini, setidaknya terdapat 2,3 juta dari total 5 juta kematian akibat rokok setiap tahunnya.

Regulasi untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di Indonesia tergolong lemah. Tercatat, satu per tiga orang dewasa di Indonesia adalah perokok. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia di 2018 menyatakan bahwa 62,9% pria dan 4,8% perempuan dewasa Indonesia adalah perokok. Jumlah perokok remaja usia 10 sampai 18 tahun juga masih terus meningkat dari tahun 2013 (7,20%) ke tahun 2018 (9,10%). Padahal batas atas perokok remaja dalam RPJMN 2019 adalah sebesar 5,4%.

Murahnya harga rokok akibat rendah dan kompleksnya struktur tarif cukai rokok menjadi salah satu penyebab tingginya angka perokok di Indonesia. Di saat tarif cukai minimum yang menjadi standar global adalah 70% dari harga jual eceran, UU Cukai malah mengatur batas maksimum tarif cukai tembakau di angka 57% dari harga jual eceran. Saat ini pun rata-rata tarif cukai di Indonesia masih berkisar pada angka 44,7% dari harga jual eceran. Dengan kata lain, tarif cukai produk tembakau di Indonesia masih di bawah standar global maupun nasional.

Di samping rendahnya tarif cukai, struktur cukai tembakau yang kompleks juga merupakan persoalan besar yang perlu disorot di Indonesia. Tergantung besarnya perusahaan dan jenis tembakau yang digunakan, tarif cukai rokok di Indonesia dibedakan menjadi 10 golongan. Hasilnya, terjadi variasi harga rokok di pasaran dan tersedianya produk rokok yang sangat terjangkau untuk dibeli oleh anak-anak. Sebagai contoh, satu batang rokok di Indonesia masih bisa ditemui dengan harga Rp 1.137 atau setara USD 0,085.

Meski urgensi untuk meningkatkan tarif dan melaksanakan simplifikasi cukai rokok dianggap sangat memungkinkan, beberapa kendala kerap dihadapi. Pertama, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh beberapa kementerian dan lembaga terbagi dalam beberapa kubu perihal masalah ini. Kementerian dan lembaga pendukung kenaikan tarif dan simplifikasi cukai rokok yang berpegang pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan perlu berhadapan dengan kementerian dan lembaga yang berpegang pada nilai keberlangsungan industri, seperti Kementerian Perindustrian dan beberapa Komisi di DPR RI.

Kedua, maraknya mitos terkait dampak kenaikan cukai rokok Indonesia, seperti kenaikan cukai rokok merugikan petani dan pekerja industri rokok. Ketiga, industri tembakau perlu diakui memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan masyarakat mengingat UU Cukai Indonesia mengatur pemerintah untuk mendengarkan aspirasi industri tembakau. Mereka masih bisa mengiklankan produk-produk secara bebas dan menjadi sponsor untuk berbagai kegiatan.

**Lindsay M. Orsolino, Executive Assistant untuk Kementerian Kesehatan Filipina**, menyatakan bahwa Filipina telah berusaha menaikkan cukai rokok semenjak tahun 2012. “Pemerintah didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat terus berupaya menaikkan cukai rokok agar produk ini sulit ditemui peredarannya. Teranyar, melalui pengesahan RUU Peningkatan Cukai Produk Tembakau, pemerintah Filipina kembali menaikkan cukai rokok menjadi P45 per bungkus pada 1 Januari 2020. Kenaikan cukai ini bertahap, pada 1 Januari 2022 menjadi P55 dan pada 1 Januari 2023 menjadi P60. Dalam 8 tahun terakhir, pemerintah Filipina telah 8 kali meningkatkan cukai rokok. Dampaknya cukup signifikan, sebab melalui mekanisme kenaikan cukai, pemerintah mampu menyerap anggaran sekitar P62 miliar untuk menutup biaya program cakupan kesehatan semesta pada tahun 2019.”

**Sasanka Dharmasena, Programme Coordinator untuk Alcohol and Drug Information Center Sri Lanka**, menyatakan upaya peningkatan cukai mencegah beban kematian akibat rokok. “Di Sri Lanka disinyalir setidaknya satu dari sepuluh orang dewasa meninggal akibat rokok. Sementara itu, sebuah survei menyatakan keluarga berpendapatan ke bawah menghabiskan sekitar 40% pemasukan mereka untuk membeli rokok. Sri Lanka telah meratifikasi Framework Convention for Tobacco Control (FCTC) semenjak 2003 lalu. Hal ini menjadikan Sri Lanka negara di wilayah Asia Tenggara pertama yang mengupayakan pengendalian tembakau melalui proses legislasi. Pengendalian cukai rokok sendiri diatur oleh Tobacco Tax Act. Pada 2016 cukai rokok dinaikkan, dalam 4 bulan pertama pendapatan dari produk-produk rokok berkurang sekitar 17%, namun produksi rokok juga berkurang hingga 31%.”

**Nurul Luntungan, Project Advisor for Tobacco Control untuk CISDI**, menegaskan bahwa dalam upaya pengendalian tembakau, upaya kolektif masyarakat akan berdampak lebih efektif jika pembuat kebijakan menunjukkan komitmen yang nyata. “CISDI telah melakukan beberapa upaya termasuk advokasi kenaikan cukai tembakau melalui audiensi dengan pembuat kebijakan, membuat penelitian dan kajian terkait harga dan simplifikasi golongan cukai tembakau, serta

kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang cukai tembakau. Upaya ini akan berdampak lebih luas jika para pembuat kebijakan memiliki komitmen yang diejawantahkan ke dalam aksi nyata yang konsisten. Hal ini mengingat pada dasarnya pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab dan kesempatan paling besar dalam melindungi masyarakat luas.”

Perjalanan Indonesia untuk menaikkan cukai tembakau masih melewati jalan berliku. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC sejak terlibat aktif dalam perumusannya pada tahun 2003. Indonesia memiliki UU Cukai namun dalam praktiknya, ada banyak tarik ulur kepentingan yang memperlambat kenaikan harga rokok melalui kenaikan cukai tembakau yang lebih tinggi dan penerapan simplifikasi struktur cukai.

**Febri Pangestu, Analis Kebijakan Badan Koordinasi Fiskal, Kementerian Keuangan,** menegaskan bahwa pemerintah tengah berusaha keras menurunkan prevalensi perokok anak. “Hingga hari ini, prevalensi perokok usia 10-18 tahun di Indonesia mencapai 9,1%, meski target yang dicanangkan sebelumnya adalah 5,4%. Di saat bersamaan pemerintah terus berupaya meningkatkan tarif cukai rokok semenjak tahun 2013. Kenaikan cukai rokok terbukti efektif mengurangi produksi rokok. Pasalnya, pada tahun 2019 ketika cukai rokok tidak dinaikkan, produksi rokok mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, perlu diakui, kegiatan menyatukan *layer* cukai rokok berat untuk dilaksanakan karena banyak dan beragamnya aktor dan produsen rokok di Indonesia.”

## SELESAI

### Tentang CISDI

*Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan.

### Tentang pulihkembali.org dan Festival Pemilu Harga

pulihkembali.org adalah platform pengumpulan dukungan yang merupakan bagian dari kampanye publik Festival Pemilu Harga yang diselenggarakan oleh CISDI, Komnas PT, PKJS UI, dan JP3T. Festival Pemilu Harga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah dalam peningkatan tarif dan simplifikasi cukai rokok dan manfaatnya bagi pemulihan ekonomi, terutama di masa pandemi. Melalui ragam aksi kreatif dan diseminasi kajian ilmiah, rangkaian acara Festival Pemilu Harga berlangsung sepanjang bulan Agustus-Oktober untuk mengumpulkan dukungan masyarakat untuk mendukung kebijakan Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif harga rokok sebagai bentuk upaya pengendalian terhadap konsumsi rokok. Pengumpulan dukungan publik di situs pulihkembali.org terangkum dalam polling dukungan yang masih akan terus berlangsung hingga akhir Oktober 2020.

*Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:*

Sdr. Amru Sebayang  
Content & Media Officer  
Email: [communication@cisdi.org](mailto:communication@cisdi.org)  
[www.cisdi.org](http://www.cisdi.org)